

## ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Anna Yuniasari<sup>1</sup>, Dyah Pravitasari<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung<sup>1,2</sup>

[annayunia20@gmail.com](mailto:annayunia20@gmail.com), [dyahpravitasariiainta@gmail.com](mailto:dyahpravitasariiainta@gmail.com)

Received: 25-03-2025

Revised: 09-04-2025

Approved: 23-04-2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui pendekatan rasio keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2021–2023. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BPKAD Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan analisis data menggunakan lima rasio keuangan menurut Mahmudi (2019), yaitu: rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung dalam aspek derajat desentralisasi berada pada kategori "sedang", dengan rata-rata 26%. Rasio ketergantungan keuangan menunjukkan kategori "sangat tinggi" dengan rata-rata 73%, sedangkan rasio kemandirian berada pada kategori "rendah" dengan pola hubungan "konsultatif". Temuan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum optimal dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa banyak daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serupa dalam mencapai kemandirian fiskal.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Desentralisasi, Ketergantungan, Kemandirian

### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki keharusan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir periode anggaran baik itu dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota (Farida & Nugraha, 2019). Laporan pertanggungjawaban ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan penganggaran sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga memiliki fungsi guna melihat kondisi keuangan suatu pemerintah daerah serta berfungsi sebagai aspek penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan aspek penilaian guna mengukur tingkat keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan otonominya yang dinilai melalui laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat. Pengukuran kinerja keuangan dalam suatu pemerintahan daerah bisa memberikan manfaat dalam membantu meningkatkan dan memperbaiki kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan tersebut bisa dihitung memakai analisis laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan adalah kegiatan yang berguna sebagai acuan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik, yang dikerjakan dengan cara menafsirkan angka-angka ada pada laporan keuangan. Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2016). Adapun analisis rasio keuangan pemerintah daerah yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi

PAD. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah telah dijadikan beberapa topik penelitian sebelumnya. Penemuan yang ditemukan oleh Purba, dkk menemukan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Samosir diukur memakai rasio keuangan memberikan hasil yang belum cukup baik (Purba et al., 2024).

Penelitian Siswanto dan Maylani menemukan hasil sebaliknya bahwa kinerja keuangan Kabupaten Subang diukur memakai rasio keuangan memberikan hasil yang cukup baik, efektif dan efisien. (Siswanto & Maylani, 2022) Penemuan tersebut juga selaras dengan penemuan yang sudah dikerjakan oleh Sari dan Yousida (Sari & Yousida, 2019), artinya kinerja keuangan Kabupaten Tanah Bumbu diukur memakai rasio keuangan memberikan hasil yang baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung adalah pemerintahan yang terbagi menjadi 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa dan berada di provinsi Jawa Timur. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung ialah lembaga atau badan yang memiliki tujuan memastikan pengoprasian keuangan dan aset daerah dibuat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Lembaga ini juga berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini akan berfokus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung adalah pemerintahan yang sudah melaksanakan otonomi daerah, memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri, serta untuk memahami apakah pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sudah dilakukan dengan baik. Alasan lain peneliti mengadakan penelitian mengenai kinerja keuangan melakukan penelitian tentang kinerja keuangan dikarenakan penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan khususnya di Kabupaten Tulungagung masih jarang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Atas dasar hal tersebutlah yang menjadi motivasi peneliti dalam melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

## METODE PENELITIAN

Peneliti memakai metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian yang pakai oleh peneliti berupa data sekunder yang didapatkan melalui website resmi BPKAD Kabupaten Tulungagung yaitu laporan keuangan tahunan periode 2021-2023 berupa laporan realisasi anggaran. Teknik pengambilan sampel oleh peneliti memakai teknik *nonprobability sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan oleh peneliti dengan cara analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi, (2019), kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis menggunakan lima rasio keuangan antara lain sebagai berikut:

### 1) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini diperoleh melalui perhitungan caranya yaitu memperbandingkan total perolehan PAD dan total pendapatan daerah. Rasio tersebut memperlihatkan bagaimana pengaruh PAD pada total pendapatan daerah. Semakin tinggi perolehan PAD maka kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi semakin tinggi juga. Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 1.**

<b>Tingkat Penilaian Derajat Desentralisasi</b>	
<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Derajat Desentralisasi (%)</b>
Sangat Kurang	0,00 – 10,00
Kurang	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,00
Cukup	30,01 – 40,00
Baik	40,01 - 50,00
Sangat Baik	> 50,00

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini diperoleh melalui perhitungan caranya yaitu memperbandingkan total pendapatan transfer dan total pendapatan daerah. Semakin tinggi pendapatan transfer yang didapatkan suatu daerah maka pemerintah daerah makin besar tingkat ketergantungannya pada transfer pemerintah pusat/provinsi. Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.**

**Tingkat Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Ketergantungan Keuangan</b>	<b>Ketergantungan (%)</b>
Sangat Rendah	0,00 – 10,00
Rendah	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,00
Cukup	30,01 – 40,00
Tinggi	40,01 - 50,00
Sangat Tinggi	> 50,00

Sumber: Litbang Depdagri (1991)

3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini diperoleh melalui perhitungan caranya yaitu memperbandingkan total perolehan PAD dan total pendapatan transfer serta pinjaman. Semakin besar nilai rasio tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah semakin tinggi. Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat +Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 3.**

**Tingkat Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemandirian Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0 – 25	Intruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

4) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini diperoleh melalui perhitungan caranya yaitu membandingkan realisasi pemasukan PAD dan anggaran pemasukan PAD. Rasio tersebut memperlihatkan derajat kesanggupan daerah untuk mengatur pemasukan PAD selama melalui rencana program yang sudah ditetapkan. Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 4.**  
**Tingkat Penilaian Efektifitas PAD**

Kriteria Efektifitas	Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	< 75

5) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini diperoleh melalui perhitungan caranya yaitu membandingkan realisasi belanja daerah dan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil presentase efisiensi yang dihasilkan pemerintah daerah maka dapat dikategorikan pemerintah daerah tersebut makin bagus kinerjanya. Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 5.**  
**Tingkat Penilaian Efisiensi PAD**

Kriteria Efisiensi	Efisiensi (%)
Sangat Efisien	<10
Efisien	10 – 20
Cukup Efisien	21 – 30
Kurang Efisien	31 – 40
Tidak Efisien	> 40

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Rasio Derajat Desentralisasi

Kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung tahun 2021-2023 dihitung memakai rasio derajat desentralisasi didasarkan pada laporan keuangan tahunan Kabupaten Tulungagung antara lain:

**Tabel 6.**  
**Hasil Rasio Derajat Desentralisasi**

Tahun	Hasil Presentase	Kriteria
2021	30,8%	Cukup
2022	21,8%	Sedang
2023	25,3%	Sedang

Selama periode tiga tahun anggaran yaitu tahun 2021 hingga 2023 kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung memenuhi kriteria "sedang" dengan nilai presentase rata-ratanya 26%. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dikategorikan sedang karena masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri, hal tersebut dapat diperhatikan dari besarnya jumlah kontribusi PAD yang jauh sangat sedikit diperbandingkan jumlah pendapatan daerah lainnya. Kinerja keuangan pada pemerintah daerah bisa dikategorikan sangat baik apabila pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunannya sendiri (Syamsi, 1986).

Penilaian tersebut bisa diperhatikan melalui besarnya perolehan dana pembangunan daerah yang berasal dari PAD. Semakin besar perolehan pendapatan daerah maka pemerintah daerah semakin besar taraf kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya (Mahmudi, 2019). Penemuan yang ditemukan oleh peneliti mendukung penemuan yang ditemukan Admaja, dkk yang menjelaskan bahwa tahun kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung dihitung menggunakan rasio derajat desentralisasi memberikan hasil belum baik (Admaja et al., 2021). Penemuan ini selaras dengan penemuan yang telah ditemukan Hafizi dan Amalia yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Jember dihitung menggunakan rasio derajat desentralisasi memberikan hasil belum baik (Hafizi & Amalia, 2022).

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung tahun 2021-2023 dihitung memakai rasio ketergantungan didasarkan pada laporan keuangan tahunan Kabupaten Tulungagung antara lain:

**Tabel 7.**

#### **Hasil Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Hasil Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
2021	66,3%	Sangat Tinggi
2022	78,1%	Sangat Tinggi
2023	74,7%	Sangat Tinggi

Selama periode tiga tahun anggaran yaitu tahun 2021 hingga 2023 kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung memenuhi kriteria "sangat tinggi" dengan nilai presentase rata-ratanya 73%. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dikategorikan sangat tinggi karena masih belum mampu membiaya seluruh pengeluaran belanja daerahnya sendiri, hal tersebut dapat diperhatikan dari besarnya jumlah pendapatan transfer yang masih sangat banyak diperbandingkan total PAD. Kinerja keuangan suatu pemerintah daerah bisa dikategorikan sangat tinggi tingkat ketergantungannya jika daerah tersebut tetap mempunyai ketergantungan yang besar pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi berarti kontribusi pendapatan asli daerahnya masih belum mampu untuk membiaya seluruh pengeluaran daerah. Semakin besar pendapatan transfer yang diterima suatu daerah maka pemerintah daerah semakin besar tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat dan provinsi (Mahmudi, 2019).

Penemuan yang ditemukan oleh peneliti mendukung penemuan yang ditemukan Sari dan Yousida yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Tanah Bumbu dihitung menggunakan rasio ketergantungan keuangan memberikan hasil yang sangat

tinggi. (Sari & Yousida, 2019) Penemuan ini selaras dengan penemuan yang telah ditemukan Siswanto dan Maylani menjelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sleman dihitung menggunakan rasio ketergantungan keuangan memberikannya hasil yang tinggi dan nilai rata-rata sebesar 64,89% (Siswanto & Maylani, 2022).

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung tahun 2021-2023 dihitung memakai rasio kemandirian didasarkan pada laporan keuangan tahunan Kabupaten Tulungagung antara lain:

**Tabel 8.**  
**Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	Hasil Presentase	Kriteria	Pola Hubungan
2021	46,5%	Rendah	Konsultatif
2022	28%	Rendah	Konsultatif
2023	33,9%	Rendah	Konsultatif

Selama periode tiga tahun anggaran yaitu tahun 2021 hingga 2023 kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung memenuhi kriteria "rendah" dengan nilai presentase rata-ratanya 36,1%. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dikategorikan rendah karena masih belum mampu membiaya seluruh kegiatan pemerintahannya sendiri, hal tersebut dapat diperhatikan dari besarnya jumlah pendapatan transfer yang masih sangat banyak diperbandingkan dengan total PAD. Kinerja keuangan suatu daerah bisa dikategorikan berada pada tingkat kemandirian yang tinggi jika pemerintah daerah mampu membiaya kegiatan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pihak manapun. Semakin besar presentase kemandirian keuangan yang dihasilkan maka dapat dikatakan pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi (Mahmudi, 2019). Penemuan yang ditemukan oleh peneliti mendukung penemuan yang ditemukan Marliani yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bandung dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan memberikan hasil rata-rata penilaian yang rendah dan pola hubungan konsultatif. (Marliani, 2022) Penemuan ini selaras dengan penemuan yang telah ditemukan Siswanto dan Maylani menjelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Subang dihitung memakai rasio kemandirian keuangan memberikan hasil yang rendah dan rata-rata nilai sebesar 49,58% (Siswanto & Maylani, 2022).

### Rasio Efektifitas PAD

Kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung tahun 2021-2023 diukur dengan memakai rasio efektifitas pendapatan asli daerah didasarkan pada laporan keuangan tahunan Kabupaten Tulungagung antara lain:

**Tabel 9.**  
**Hasil Rasio Efektifitas PAD**

Tahun	Hasil Presentase	Kriteria
2021	165%	Sangat Efektif
2022	107%	Sangat Efektif
2023	124%	Sangat Efektif

Selama periode tiga tahun anggaran yaitu tahun 2021 hingga 2023 kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung memenuhi kriteria "sangat efektif" karena berturut-turut berada pada presentase hasil yang efektif dengan rata-rata mencapai lebih dari 100%. Kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung dikategorikan sangat efektif karena mampu merealisasikan anggarannya lebih dari yang ditargetkan, hal tersebut dapat diperhatikan dari besarnya realisasi penerimaan PAD yang didapatkan melalui berbagai aspek pendapatan antara lain pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kinerja keuangan suatu daerah bisa dikategorikan efektif jika pemerintah daerah memiliki kemampuan merealisasikan anggaran yang sudah ditargetkan. Semakin besar presentase efektivitas yang dihasilkan pemerintah daerah maka dapat dikategorikan pemerintah daerah tersebut semakin baik kinerjanya (Mahmudi, 2019). Penemuan yang ditemukan oleh peneliti mendukung penemuan yang ditemukan Purba, dkk yang menjelaskan kinerja keuangan Kabupaten Samosir diukur menggunakan rasio efektivitas PAD memberikan hasil yang sangat efektif. (Purba et al., 2024) Penemuan ini selaras dengan penemuan yang telah ditemukan Marliani yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bandung diukur menggunakan rasio efektifitas PAD memberikan hasil yang sangat efektif (Marliani, 2022).

### Rasio Efisiensi PAD

Kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung tahun 2021-2023 dihitung memakai rasio efisiensi pendapatan asli daerah didasarkan pada laporan keuangan tahunan Kabupaten Tulungagung antara lain:

**Tabel 10.**

**Hasil Rasio Efisiensi PAD**

Tahun	Hasil Presentase	Kriteria
2021	76,5%	Tidak Efisien
2022	94%	Tidak Efisien
2023	88%	Tidak Efisien

Selama periode tiga tahun anggaran yaitu tahun 2021 hingga 2023 kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung memenuhi kriteria "tidak efisien" dengan nilai presentase rata-ratanya 86,2%. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dikategorikan tidak efisien karena banyak mengeluarkan biaya dalam memperoleh PAD, hal tersebut dapat diperhatikan dari besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah bisa dikatakan efisien ditentukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Semakin kecil presentase efisiensi yang dihasilkan pemerintah daerah maka dapat dikategorikan pemerintah daerah tersebut semakin baik kinerjanya (Mahmudi, 2019).

Penemuan yang ditemukan oleh peneliti mendukung penemuan yang ditemukan Farida dan Nugraha yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan pada Kabupaten Subang diukur menggunakan rasio efisiensi PAD memberikan hasil tidak efisien. (Farida & Nugraha, 2019) Penemuan tersebut menjelaskan hasil yang bertolak belakang dengan penemuan yang ditemukan Siswanto dan Maylani menjelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Subang diukur menggunakan rasio efisiensi PAD memberikan hasil sangat efisien dan memiliki rata-rata nilai sebesar 5,11%. (Siswanto & Maylani, 2022)

## KESIMPULAN

Hasil analisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan dapat ditarik kesimpulan tingkat penilaian rasio derajat desentralisasi sepanjang tiga tahun anggaran menunjukkan kriteria “sedang”. Rasio ketergantungan keuangan daerah sepanjang tiga tahun anggaran menunjukkan kriteria “sangat tinggi”. Rasio kemandirian keuangan daerah sepanjang tiga tahun anggaran menunjukkan kriteria “rendah” dengan pola hubungan konsultatif. Rasio efektifitas PAD sepanjang tiga tahun anggaran menunjukkan kriteria “sangat efektif”. Rasio efisiensi PAD sepanjang tiga tahun anggaran menunjukkan kriteria “tidak efisien”. Berdasarkan pengukuran tersebut dapat dikatakan Kabupaten Tulungagung masih belum baik kinerja keuangannya dalam mengelola keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admaja, A., Anggraini, D., Larasati, M., Cahyanti, N. D., Wasil, M., Admaja, A., Anggraini, D., Larasati, M., Cahyanti, N. D., Wasil, M., Ekonomi, F., Veteran, U. P. N., Timur, J., Kesehatan, I., Admaja, A., & Dwi, N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2018. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(2).
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 116–130. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Empat). Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ketiga). UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, 14(1), 11–20.
- Negeri, D. D. (1991). *Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab*. Litbang Depdagri.
- Purba, S., Sigoro, T., Nadeak, O., Tampubulon, S., & Siahaan, D. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 5(1), 67.
- Sari, I. I., & Yousida, I. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1), 129–142. <https://doi.org/10.35972/jieb.v5i1.264>
- Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Syamsi, I. (1986). *Pokok-pokok Kebijakan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional* (Edisi Pertama). Rajawali.